

## Meritokrasi vs Patronase Dalam Seleksi PPPK: Analisis Wacana Media Dengan Perspektif Foucault Tentang Kekuasaan

Nesriani<sup>a</sup> | Arfriani Maifizar<sup>b</sup> |

<sup>a,b</sup>) Program Studi Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

\*Corresponding Email: [nesriani@utu.ac.id](mailto:nesriani@utu.ac.id)

### ABSTRACT

*This study analyzes media coverage related to alleged fraud in the selection process of Government Employees with Work Agreements (PPPK) using Foucault's theory of power and discourse. The study aims to reveal how online media frame and shape public perceptions regarding the PPPK selection process, as well as how power and ideology related to meritocracy and patronage are constructed through media discourse. The data analyzed include various articles reporting practices such as data manipulation, document falsification, and lack of transparency in the PPPK selection process across different regions. The analytical approaches used in this study are discourse analysis, framing analysis, and critical media analysis. The results show that the media play an important role in constructing discourse that leads to public distrust toward the PPPK selection system. The framing used by the media often highlights the injustices arising from patronage practices and questions the effectiveness of the meritocratic system that is supposed to underpin the selection process. This analysis also reveals that the media, as a tool for disseminating knowledge and shaping ideology, either reinforce or critique existing power structures and play a significant role in promoting resistance discourse against injustices in the PPPK selection process. By relating this to Foucault's theory of power, the media not only reflect social reality but also function as a space of resistance against dominant power structures within the bureaucratic system.*

**Keywords:** *discourse analysis, frame analysis, critical media analysis, Foucault's power theory.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis pemberitaan media terkait dugaan kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggunakan pendekatan teori kekuasaan dan wacana Foucault. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana media online membingkai dan membentuk persepsi publik mengenai seleksi PPPK, serta bagaimana kekuasaan dan ideologi terkait meritokrasi dan patronase terbentuk melalui wacana media. Data yang dianalisis mencakup berbagai artikel yang melaporkan praktik manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan ketidaktransparanan dalam proses seleksi PPPK di berbagai daerah. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis wacana (discourse analysis), analisis frame, dan analisis media kritis (critical media analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media berperan penting dalam membentuk wacana yang mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap sistem seleksi PPPK. Framing yang digunakan oleh media sering kali mengedepankan ketidakadilan yang timbul akibat praktik patronase, serta mempertanyakan efektivitas sistem meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar seleksi. Analisis ini juga mengungkapkan bahwa media, sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan dan membentuk ideologi, memperkuat atau mengkritik kekuasaan yang ada, serta memainkan peran penting dalam mendorong wacana perlawanan terhadap ketidakadilan dalam proses seleksi PPPK. Dengan mengaitkan teori Foucault mengenai kekuasaan, media tidak hanya mencerminkan kenyataan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai ruang perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dominan dalam sistem birokrasi.*

**Kata kunci:** *analisis wacana, frame analysis, critical media analysis, kekuasaan Foucault*

### Citation:

Nesriani, N., & Maifizar, A. (2026). Meritokrasi vs patronase dalam seleksi PPPK: Analisis wacana media dengan perspektif Foucault tentang kekuasaan. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 10(1). 45 - 61

## **PENDAHULUAN**

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah menjadi salah satu metode penting dalam memperkuat kapasitas dan kualitas birokrasi di Indonesia. Sistem meritokrasi diharapkan dapat menjamin bahwa seleksi pegawai dilakukan secara adil dan objektif berdasarkan kompetensi dan kinerja individu. Namun, praktik seleksi PPPK di beberapa instansi pemerintah daerah menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip meritokrasi dan praktik patronase yang sering kali melibatkan pengaruh politik dan hubungan pribadi. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat memengaruhi proses seleksi yang seharusnya transparan dan berbasis pada kemampuan, namun sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik atau kekuasaan lokal.

Prinsip meritokrasi mengedepankan seleksi berdasarkan kinerja dan kompetensi yang terukur, sementara patronase lebih menekankan pada hubungan personal atau afiliasi politik yang bisa memengaruhi peluang seseorang untuk memperoleh posisi tertentu. Penerimaan PPPK di pemerintahan daerah seringkali menghadapi dilema, yaitu antara mempertahankan objektivitas dalam seleksi dengan pertimbangan politik atau hubungan yang tidak selalu berlandaskan pada kinerja. Beberapa laporan dan temuan terkait proses seleksi PPPK menunjukkan adanya keluhan dari peserta mengenai kurangnya transparansi, potensi manipulasi dalam seleksi, serta pengaruh politik yang mendalam dalam penentuan penerimaan pegawai. Sebagai contoh, pada seleksi PPPK 2024, banyak peserta yang mengeluhkan bahwa seleksi tidak sesuai dengan standar kompetensi yang seharusnya diterapkan. Hal ini disoroti dalam artikel yang diterbitkan oleh Citra Media Nusantara, yang menyoroti ketidakjelasan dalam prosedur seleksi dan dugaan adanya intervensi politik. Selain itu, laporan dari RRI juga mencatat bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan bahwa seleksi PPPK yang tidak berbasis pada kompetensi menjadi masalah serius dalam peningkatan kualitas birokrasi. Artikel lainnya seperti yang diterbitkan oleh UGM dan Ombudsman juga memberikan masukan kritis terkait dengan sistem seleksi PPPK yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Isu ini semakin diperkuat oleh kritik yang datang dari DPRD Semarang, yang menilai bahwa proses rekrutmen PPPK tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta perlunya pemetaan yang lebih jelas terhadap ahli dan praktisi yang dibutuhkan dalam seleksi tersebut.

Selain itu, dalam sebuah artikel *Republika*, Presiden Indonesia meminta untuk meninjau ulang penilaian rekrutmen PPPK, yang mengindikasikan adanya kesadaran tinggi mengenai pentingnya evaluasi transparansi dalam penerimaan PPPK di instansi pemerintah. Kritik Dohm, (1975) menunjukkan adanya konflik struktural antara praktik meritokrasi yang ideal dengan kenyataan politik yang sering kali melibatkan relasi kuasa dalam menentukan calon penerima. Riset ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa yang terjadi dalam proses seleksi PPPK di pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap transparansi, kompetensi, dan keadilan dalam penerimaan PPPK. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketegangan yang muncul akibat ketidaksesuaian antara prinsip meritokrasi dengan praktik patronase yang berpengaruh dalam proses seleksi, serta bagaimana hal ini menciptakan konflik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Locus penelitian ini difokuskan pada instansi pemerintahan daerah, di mana seleksi PPPK sering kali melibatkan pengaruh politik yang lebih kental. Berbagai daerah dengan pola pemerintahan yang berbeda dapat dijadikan contoh untuk menggali lebih dalam mengenai ketegangan antara meritokrasi dan patronase. Penelitian ini akan memfokuskan pada dampak relasi kuasa antara pejabat lokal dan calon PPPK, serta bagaimana konflik

yang terjadi dalam seleksi dapat mempengaruhi hasil seleksi dan dampaknya terhadap keadilan dan transparansi dalam penerimaan PPPK. Selain itu, riset ini akan meneliti apakah sistem meritokrasi yang diterapkan dapat bertahan atau tergeser oleh kepentingan politik dan patronase.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Persepsi Politik**

Suárez Serrato et al. (2019) mengungkapkan bahwa sistem promosi meritokratis yang diterapkan di Tiongkok, meskipun bertujuan untuk memilih pejabat yang berkualitas, menghadapi tantangan besar terkait manipulasi data kinerja yang tidak terverifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem meritokrasi didesain dengan niat baik untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, adanya data yang tidak dapat diverifikasi mengurangi efektivitasnya. Data yang tidak terverifikasi menghambat kemampuan sistem ini dalam menyeleksi individu yang berkualitas. Temuan ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji konteks birokrasi di negara lain, serta dampak dari penggunaan data yang tidak terverifikasi dalam sektor publik secara lebih luas. Penelitian yang lebih mendalam dibutuhkan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam situasi yang berbeda serta untuk mengetahui bagaimana cara memperbaiki sistem ini agar lebih transparan dan efektif.

Fiske, (2019) membahas pentingnya persepsi politik yang dibangun melalui stereotip berdasarkan dimensi “Kehangatan” dan “Kompetensi”. Ia menyoroti bagaimana dimensi ini memainkan peran penting dalam menjelaskan pembagian kelas sosial dan ketegangan yang muncul dalam politik. Melalui pendekatan psikologi sosial, Fiske menjelaskan bagaimana persepsi terhadap politisi dan kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi keputusan politik serta menambah rasa ketidakpercayaan antar kelas sosial. Namun, riset Motion & Leitch, (2007) terlihat dalam kajian ini adalah kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana dimensi kognitif ini mempengaruhi kebijakan publik, terutama di negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Studi Ladkin & Probert, (2021) membuka peluang untuk mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara persepsi politik berbasis dimensi sosial dan dampaknya terhadap kebijakan publik, khususnya di negara-negara dengan struktur sosial yang kompleks.

Atria et al. (2020) fokus pada bagaimana elit ekonomi di Chile memandang meritokrasi, khususnya dalam mengatasi ketimpangan sosial yang telah berlangsung lama. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun elit ekonomi mendukung sistem meritokrasi, mereka lebih menekankan pada pentingnya bakat pribadi dalam mencapai posisi puncak, bukan usaha keras. Mereka menghubungkan kesuksesan dengan kemampuan dalam dunia bisnis dan menolak kebijakan redistribusi melalui sektor publik. Penelitian Guizzo et al., (2015) menyoroti adanya kesenjangan riset terkait bagaimana sikap elit terhadap meritokrasi berhubungan dengan mobilitas sosial antar generasi. Lebih lanjut, perlu dicermati bagaimana pandangan elit ini dapat diterapkan di negara-negara dengan sistem ekonomi yang serupa, serta dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan telaah sistematis mengenai "primes" meritokrasi dalam relasi antarkelompok, terlihat bahwa aktivasi dimensi meritokrasi; baik secara deskriptif maupun normative, secara konsisten mendorong atribusi internal, evaluasi negatif, dan stereotip terhadap kelompok berstatus rendah

(Alessandro et al., 2025; Gliddon, 1975). Ini mempengaruhi keputusan dalam konteks organisasi, tetapi terdapat heterogenitas dalam operasionalisasi komponen yang dipriming, manipulasi, dan uji manipulasi yang membatasi komparabilitas antar-studi. Oleh karena itu, perlu ada standardisasi konstruksi prime yang memisahkan dengan jelas empat komponen konseptual: usaha, kendali internal, mobilitas sosial, dan kesempatan setara. Selain itu, perlunya pelaporan manipulasi yang transparan serta pengujian lintas konteks budaya dan domain keputusan (seperti rekrutmen, evaluasi kinerja, dan kompensasi) akan memberikan kejelasan lebih dalam mengenai kausalitas dalam berbagai situasi (Sudradjat, 2012). Konsistensi desain dan pengujian keefektifan prime perlu ditingkatkan untuk mengurangi bias inferensial dan meningkatkan replikasi efek, terutama di masyarakat non-Barat yang lebih berstrata (Gale & Yogeewaran, 2025).

Drury, (1975) menggunakan teori neoliberalism dalam pendidikan untuk menganalisis ketimpangan dalam akses pendidikan di India pasca-liberalisasi. Drury menunjukkan bagaimana pendidikan diperlakukan sebagai komoditas dalam kerangka neoliberal yang terbatas pada mobilitas sosial. Artikel ini menyoroti disparitas pendidikan dalam konteks kebijakan afirmatif berbasis kasta. Aplikasi teori ini terlihat dalam perubahan kebijakan afirmatif di pendidikan tinggi India, dan bagaimana kebijakan ini berkembang seiring perubahan ekonomi yang terjadi. Penelitian ini menekankan perlunya kajian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan afirmatif terhadap ketimpangan pendidikan di India serta bagaimana kebijakan ini dapat diperbaiki untuk menciptakan kesetaraan pendidikan yang lebih efektif dalam era neoliberal.

Bukti eksperimen mengenai interaksi kekuasaan dan pertimbangan meritokratis menunjukkan adanya pola asimetris dalam akses terhadap daya tawar (Kuppens et al., 2018). Akses yang diberikan melalui peran pengusul atau opsi luar yang menarik memperlihatkan alokasi yang menguntungkan diri dan persepsi keadilan yang bersifat self-serving. Sebaliknya, ketiadaan keduanya mendorong alokasi yang merugikan tanpa mengubah persepsi keadilan. Menariknya, persepsi keadilan menjadi simetris ketika posisi kuasa diperoleh melalui prosedur yang dianggap meritokratis (keadilan prosedural). Temuan ini mengindikasikan adanya disonansi kognitif pada pihak yang berkuasa, yang bukan hanya pada pihak yang tidak berkuasa, dalam "menyamakan" perilaku dan persepsi keadilan. Penelitian lanjutan perlu menguji dinamika ini di organisasi nyata dengan konsekuensi nyata, seperti promosi atau bonus, serta memanipulasi legitimasi prosedural dan informasi kontribusi dalam tugas yang relevan.

Dohm, (1975) menerangkan penggunaan teori sistem dalam peramalan teknologi untuk pembuatan kebijakan publik. Sistem teori melihat pembuatan kebijakan sebagai proses yang melibatkan interaksi berbagai elemen dalam masyarakat yang saling berhubungan. Teknologi peramalan digunakan untuk memprediksi perkembangan kebijakan berdasarkan teknologi. Aplikasi teori ini terwujud dalam penggunaan metode seperti PPBS (Planning-Programming-Budgeting System) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Penelitian Dohm ini membuka peluang untuk mengeksplorasi bagaimana peramalan teknologi dapat diterapkan dalam kebijakan publik di sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan.

Artikel Hegade & Andalgavkarkulkarni (2025) menggunakan teori intersectionality untuk mengkaji bagaimana identitas sosial seperti gender, kasta, dan kelas berinteraksi dalam membentuk

persepsi terhadap kebijakan afirmatif di India. Menggunakan teori intersectionality yang dikembangkan oleh Crenshaw, artikel ini menjelaskan bagaimana berbagai identitas sosial berinteraksi dalam pengalaman ketidaksetaraan dan marginalisasi. Dalam kajian Jessop, (2007), meritocratic discourse berhubungan dengan pandangan tentang keadilan dan meritokrasi, menunjukkan bagaimana narasi meritokrasi sering kali bertentangan dengan kebijakan redistribusi yang mengutamakan pemerataan kesempatan. Artikel Swazo, (2005) mengungkap bagaimana solidaritas antar kelompok marjinal dapat terwujud dalam kebijakan afirmatif yang berbasis kasta atau ekonomi, serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi sikap kelompok sosial terhadapnya.

Kjelshus, (1968) membahas elitisme versus partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan menggunakan sudut pandang elitisme, artikel ini membahas bagaimana kebijakan sering kali dibuat oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan keahlian teknis lebih besar. Kjelshus berfokus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dengan membahas apakah kebijakan harus melibatkan masyarakat secara luas atau tetap dipimpin oleh elit dengan keahlian teknis. Diskusi ini menyarankan pentingnya mengintegrasikan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas.

Foucault, dalam peralihannya dari pandangan kekuasaan yang berpusat pada penguasa menuju kekuasaan yang lebih terdesentralisasi dan tersebar di seluruh masyarakat, menjelaskan bahwa strategi tidak hanya diterapkan oleh elit atau pemimpin politik, tetapi juga dalam organisasi sosial yang lebih luas (Iftode, 2013; Mckinlay & Pezet, 2018). Konsep "heterotopia" yang dikemukakan Foucault, yang merujuk pada ruang-ruang yang ada dalam oposisi terhadap tatanan sosial biasa, sering kali mencerminkan atau menentang norma-norma sosial (Brady, 2021). Foucault mengemukakan bahwa teori ruangnya, melalui heterotopia, dapat digunakan untuk memahami kompleksitas ruang urban kontemporer. Artikel ini juga membahas konsep "care of the self" dalam konteks etika transformasi diri, serta penerapan konsep pemerintahan dan strategi dalam konteks neoliberalisme.

Artikel Armstrong, (2015a, 2015b) menggabungkan pemikiran Foucault tentang "panopticon" dengan teori realisme, khususnya mengenai peran infrastruktur kereta api di China sebagai alat kontrol sosial. Konsep "circulatory panopticon" diperkenalkan untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui pergerakan individu (Kuppens et al., 2018). Dalam konteks ini, elemen-elemen material seperti kartu identitas dan tiket tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga membentuk identitas dan pergerakan sosial. Foucault dan Barad's teori realisme agensial diintegrasikan untuk menjelaskan bagaimana objek material ini membentuk kekuasaan dan identitas melalui interaksi sosial. Artikel Armstrong, (2015a) juga mengaitkan wacana kritis dan konsep "power-knowledge" Foucault untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan membentuk individu dalam konteks sosial dan politik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Discourse Analysis, Frame Analysis, dan Critical Media Analysis untuk menganalisis pemberitaan terkait seleksi PPPK pada instansi pemerintahan daerah. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana media online membingkai dan membentuk persepsi publik tentang sistem seleksi PPPK, dengan sudut pandang Foucault yang menekankan kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial yang terbentuk melalui

wacana (Dewey, 2016). Discourse analysis digunakan untuk menganalisis bagaimana berita tentang seleksi PPPK membentuk makna dan ideologi terkait dengan meritokrasi dan patronase. Metode ini fokus pada bagaimana bahasa dalam pemberitaan tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk pandangan masyarakat tentang sistem seleksi tersebut. Melalui analisis wacana, kita dapat melihat bagaimana media menggambarkan peran individu atau kelompok dalam seleksi, dan bagaimana diskursus meritokrasi dan patronase diterjemahkan dalam pemberitaan. Analisis struktur wacana menganalisis penggunaan kata-kata, metafora, dan framing yang digunakan dalam berita untuk menggambarkan proses seleksi PPPK. Misalnya, bagaimana pemberitaan menggambarkan transparansi, keadilan, atau keberpihakan dalam seleksi. Interpretasi ideologi kemudian digunakan untuk menilai bagaimana berita membangun ideologi tertentu, seperti apakah pemberitaan lebih banyak menggambarkan meritokrasi sebagai prinsip utama atau lebih menekankan pada hubungan patronase yang memengaruhi hasil seleksi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana media online membentuk ideologi yang mendasari sistem seleksi PPPK dan bagaimana hubungan kekuasaan dalam diskursus ini memengaruhi pandangan publik.

Frame analysis berguna untuk memahami bagaimana media memilih untuk "membangkitkan" isu tentang seleksi PPPK, apakah lebih fokus pada aspek kompetensi dan kemampuan (meritokrasi) atau lebih menonjolkan hubungan pribadi dan patronase. Dengan menganalisis bagaimana media menyajikan berita ini, kita bisa memahami bagaimana informasi tersebut disusun untuk membentuk persepsi publik terhadap efektivitas dan keadilan dalam seleksi PPPK. Identifikasi framing menentukan bagaimana media membangkitkan isu seleksi PPPK. Apakah media lebih menyoroti ketidakadilan dalam proses seleksi, ataukah menekankan keberhasilan sistem meritokrasi dalam menjaring tenaga kerja yang kompeten. Penyusunan kategori framing akan menyusun kategori framing berdasarkan topik yang dominan dalam berita, seperti framing terkait keadilan sosial, persaingan yang sehat, atau kritik terhadap sistem patronase. Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan bagaimana framing yang digunakan dalam berbagai sumber berita atau pada waktu yang berbeda. Misalnya, membandingkan bagaimana berita di media nasional dengan media lokal mengungkapkan seleksi PPPK.

Critical Media Analysis memberikan perspektif kritis terhadap pemberitaan yang ada, dengan fokus pada bagaimana media memperkuat struktur kekuasaan dan ketimpangan dalam seleksi PPPK. Pendekatan Foucault digunakan untuk menilai bagaimana media membangun narasi yang mendukung kekuasaan tertentu, seperti elite politik atau birokrasi, yang mungkin memperburuk ketimpangan dalam proses seleksi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai bagaimana media memengaruhi pandangan masyarakat terhadap ketidakadilan yang ada dalam sistem seleksi PPPK dan bagaimana pemberitaan ini memperkuat atau mengkritik struktur kekuasaan yang ada. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada otoritas politik, tetapi juga tersebar melalui praktik sosial dan institusional. Kekuasaan ini dapat terlihat dalam bagaimana struktur seleksi dan pemberitaan membentuk identitas dan peran individu yang terlibat. Misalnya, apakah sistem seleksi lebih menekankan pada pengakuan terhadap kompetensi individu (meritokrasi) ataukah lebih menekankan pada hubungan yang dibangun melalui patronase. Dengan menggabungkan ketiga metode ini (discourse analysis, frame analysis, dan critical media analysis) serta perspektif Foucault, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana media online

membingkai dan membentuk persepsi publik tentang seleksi PPPK, serta bagaimana dinamika kekuasaan dan ideologi berkembang melalui pemberitaan tersebut. Analisis ini akan mengungkapkan bagaimana seleksi PPPK, yang seharusnya berbasis pada meritokrasi, mungkin malah dipengaruhi oleh praktik patronase, dan bagaimana hal ini dipersepsikan oleh publik melalui media.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Manipulasi Data untuk Seleksi PPPK Bisa Dipidana**

Artikel ini menggunakan bahasa hukum yang tegas, yang mengarah pada keseriusan masalah kecurangan dalam seleksi PPPK. Pemberitaan ini membingkai proses seleksi PPPK sebagai aktivitas yang transparan dan berbasis hukum, dengan memberikan tekanan pada sisi legalitas dan potensi sanksi bagi pihak yang terlibat dalam manipulasi data. Dengan menggunakan istilah "dipidana" dan "kelulusan dibatalkan", pemberitaan ini membentuk makna bahwa seleksi PPPK seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan dan kompetensi yang bebas dari pengaruh eksternal atau manipulasi.

- a) Framing: Menekankan pada aspek hukum dan konsekuensi manipulasi data.
- b) Ideologi: Menggambarkan seleksi PPPK sebagai mekanisme yang harus dipatuhi dengan integritas penuh.

#### **2. Dugaan Kecurangan Pemalsuan Dokumen PPPK**

Artikel ini mengungkapkan potensi kecurangan dalam seleksi PPPK melalui pemalsuan dokumen. Discourse Analysis pada artikel ini akan melihat bagaimana bahasa yang digunakan menggambarkan seleksi sebagai proses yang rentan terhadap praktik curang dan tidak sepenuhnya transparan. Berita ini mengedepankan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada, dengan penggunaan istilah "dugaan" yang memberi kesan bahwa masih ada ruang untuk penyelidikan lebih lanjut.

- a) Framing: Fokus pada dugaan pelanggaran integritas dalam seleksi.
- b) Ideologi: Menggambarkan sistem seleksi PPPK sebagai kurang efektif dan terbuka terhadap penyalahgunaan.

#### **3. Terbukti Curang, Satu PPPK di Lingkungan Pemkab Pasuruan Berakhir Pemecatan**

Artikel ini menyoroti seorang peserta seleksi PPPK yang terlibat kecurangan dan akhirnya dipecat. Berita ini mengedepankan ketegasan dalam penegakan aturan dan pentingnya keadilan dalam proses seleksi PPPK.

- a) Framing: Mengedepankan keberhasilan sistem seleksi dalam menindak kecurangan.
- b) Ideologi: Memperkuat nilai meritokrasi dengan menunjukkan bahwa kecurangan tidak akan dibiarkan, bahkan jika itu melibatkan pejabat.

#### **4. Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Ketapang**

Dalam pemberitaan ini, media lebih menekankan pada aspek ketidakadilan dan dugaan adanya

konspirasi dalam seleksi PPPK. Penyajian berita dengan menggambarkan kecurangan sebagai isu yang melibatkan banyak pihak mengarah pada framing bahwa sistem seleksi ini belum sepenuhnya bisa dipercaya.

a) Framing: Penekanan pada ketidakadilan dan manipulasi dalam proses seleksi.

b) Kategori Framing: Keberpihakan, ketidakadilan sosial.

#### 5. Investigasi Kecurangan Rekrutmen PPPK OKU 2024 oleh Ombudsman

Artikel ini menggambarkan upaya investigasi oleh Ombudsman terhadap dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK. Media menggunakan framing investigasi untuk menunjukkan bahwa ada upaya transparansi dan keadilan. Framing ini menyiratkan bahwa sistem seleksi PPPK perlu diawasi lebih ketat untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.

a) Framing: Penekanan pada upaya perbaikan dan penyelidikan lebih lanjut.

b) Kategori Framing: Keberhasilan sistem untuk memperbaiki ketidakadilan.

#### 6. Rekrutmen PPPK Aceh Besar Dicoreng Praktik Kecurangan

Dalam artikel ini, media menggunakan pendekatan kritis terhadap praktik kecurangan yang terjadi dalam seleksi PPPK, dengan menyarankan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengontrol proses tersebut demi kepentingan pribadi.

a) Kritik terhadap Kekuasaan: Artikel ini mengkritik kuatnya kekuasaan dalam proses seleksi yang mungkin mendorong praktik patronase, dengan media menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan di dalam seleksi.

b) Foucault: Artikel ini berusaha menggambarkan bagaimana kekuasaan yang tersebar dalam sistem birokrasi dan media dapat mempengaruhi opini publik tentang sistem seleksi PPPK, yang bisa jadi lebih terbuka untuk pengaruh tertentu daripada prinsip meritokrasi.

#### 7. Dugaan Kecurangan dalam Seleksi PPPK di Jambi

Artikel ini mengkritik bagaimana seleksi PPPK di Jambi dinilai tidak adil dan terdapat dugaan kecurangan. Ini mengarah pada penilaian bahwa struktur kekuasaan dalam seleksi PPPK dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan yang memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem ini.

a) Kritik terhadap Kekuasaan: Media menyoroti adanya kekuasaan yang mendominasi dalam proses seleksi, yang dapat memperburuk ketimpangan antara peserta yang memiliki koneksi politik dan mereka yang berkompentensi tinggi.

Dalam artikel-artikel yang ada, seperti "Manipulasi Data untuk Seleksi PPPK Bisa Dipidana, Kelulusan Dibatalkan" di Aceh Singkil, kita dapat melihat penggunaan bahasa yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarah pada pembentukan pandangan publik mengenai keadilan dan transparansi dalam seleksi. Media menggunakan kata-kata seperti "manipulasi", "kecurangan", dan "penyalahgunaan wewenang" untuk menggambarkan situasi yang merugikan sistem meritokrasi, menunjukkan bahwa ada kekuasaan yang bekerja di balik praktik seleksi yang seharusnya transparan dan berbasis kompetensi. Melalui analisis struktur wacana, kita dapat memahami bagaimana kata-kata ini digunakan untuk mempengaruhi opini publik tentang kredibilitas

dan keadilan seleksi (Iftode, 2013; Rocha, 2011). Berita seperti "Dugaan Kecurangan Pemalsuan Dokumen PPPK" dari RRI menggambarkan framing yang menekankan pada aspek manipulasi dan pemalsuan dokumen yang merugikan sistem seleksi, dengan kata-kata yang mengarah pada kecurangan dan pelanggaran hukum. Framing ini menyiratkan ketidakadilan dalam seleksi PPPK, dengan media lebih menekankan pada hubungan yang terjadi di balik layar, yang mencerminkan pengaruh patronase. Dalam beberapa berita lain, seperti yang dipublikasikan oleh Radar Bromo, framing lebih menekankan pada akibat hukuman terhadap mereka yang terbukti melakukan kecurangan, membingkai berita ini sebagai langkah tegas terhadap penyalahgunaan proses seleksi. Dengan demikian, media menyajikan seleksi PPPK lebih sebagai arena yang penuh dengan ketidakadilan dan tantangan integritas daripada sebagai sistem yang berbasis pada kemampuan dan kompetensi. Media yang membahas masalah seperti "Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Ketapang" atau "Ombudsman Sumsel Investigasi Kecurangan Rekrutmen PPPK OKU" sering kali memfokuskan pada ketidakadilan yang terjadi akibat praktik yang berakar pada patronase. Dalam pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana media membangun narasi yang memperkuat ketimpangan yang terjadi dalam proses seleksi. Menggunakan perspektif Foucault, kita dapat menganalisis bagaimana kekuasaan tersebar dalam praktik seleksi PPPK ini, baik melalui kontrol administratif, hubungan antara pejabat dan calon pelamar, maupun penerapan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Proses framing ini tidak hanya menentukan bagaimana isu disajikan, tetapi juga bagaimana media menyusun informasi untuk membentuk pandangan publik terhadap efektivitas dan keadilan dalam seleksi tersebut. Misalnya, pemberitaan yang fokus pada dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK akan membingkai isu ini dalam konteks ketidakadilan dan kecurangan sistematis, sedangkan pemberitaan yang lebih positif tentang meritokrasi akan membingkai proses seleksi sebagai cara untuk memilih yang terbaik berdasarkan kemampuan. Dengan analisis framing, kita dapat mengidentifikasi kategori-kategori dominan dalam pemberitaan, seperti keadilan sosial, transparansi, atau kritik terhadap patronase. Analisis perbandingan antara pemberitaan dari berbagai media; baik media nasional maupun lokal, dapat mengungkap perbedaan framing yang digunakan, yang menunjukkan bagaimana media di berbagai wilayah membingkai isu ini dengan cara yang berbeda. Pendekatan Foucault menilai bagaimana media membangun narasi yang mendukung kekuasaan tertentu, seperti elite politik atau birokrasi, yang dapat memperburuk ketimpangan dalam proses seleksi. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tersebar melalui berbagai praktik sosial dan institusional, bukan hanya terpusat pada otoritas politik. Oleh karena itu, pemberitaan media yang membahas seleksi PPPK dapat mencerminkan bagaimana kekuasaan ini mempengaruhi proses seleksi dan pandangan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem tersebut. Media sering kali membingkai seleksi PPPK sebagai sistem yang adil dan transparan, namun dalam prakteknya, struktur seleksi tersebut bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik atau hubungan patronase yang mengarah pada ketidakadilan. Melalui analisis kritis ini, kita dapat menilai apakah media memperkuat atau mengkritik struktur kekuasaan yang ada dalam seleksi PPPK.

Beberapa berita melaporkan adanya dugaan kecurangan dan manipulasi data dalam seleksi PPPK, yang menggambarkan ketidakadilan dalam proses tersebut. Misalnya, dalam pemberitaan yang dipublikasikan oleh BKPSDM Aceh Singkil, disebutkan bahwa manipulasi data dalam seleksi PPPK

dapat dipidana dan kelulusan dapat dibatalkan, yang menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam seleksi ini. Sementara itu, pemberitaan di RRI dan Radar Bromo juga melaporkan dugaan kecurangan seperti pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi. Berita-berita ini menggambarkan bagaimana media membingkai seleksi PPPK sebagai sebuah sistem yang rentan terhadap praktik ketidakadilan, yang merugikan peserta yang seharusnya berhak lulus berdasarkan kompetensi.

Namun, di sisi lain, beberapa media seperti Kompas dan Mediatipikor menyoroti dugaan ketidakadilan dalam seleksi PPPK di berbagai daerah dan menyerukan penyelidikan lebih lanjut, yang menunjukkan bahwa framing yang digunakan oleh media tidak selalu sama. Dalam pemberitaan seperti ini, media cenderung menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam seleksi, serta mengkritik adanya praktik-praktik yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pembacaan media yang ada, kita bisa melihat bagaimana media online memainkan peran penting dalam membentuk pandangan publik tentang sistem seleksi PPPK, serta bagaimana hubungan kekuasaan dan ideologi dalam pemberitaan ini membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam seleksi tersebut. Dengan menganalisis bagaimana media membingkai dan menyajikan isu-isu ini, kita dapat lebih memahami bagaimana dinamika sosial dan kekuasaan yang tercermin dalam wacana media berpengaruh terhadap cara masyarakat memandang sistem seleksi PPPK.

## **Pembahasan**

### **Hubungan Kekuasaan dan Wacana**

Media dalam pemberitaannya membingkai masalah kecurangan ini dengan menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan diperkuat atau ditantang. Misalnya, pemberitaan tentang dugaan korupsi dalam seleksi PPPK (seperti suap atau pemalsuan dokumen) sering kali menempatkan kesalahan pada individu tertentu yang memiliki kekuasaan, seperti pejabat pemerintah daerah. Wacana media ini tidak hanya mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menyoroti bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau pihak tertentu memengaruhi proses seleksi, yang pada akhirnya memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem (Iftode, 2013; Rocha, 2011). Dalam teori Foucault, kekuasaan tidak hanya terpusat pada otoritas yang tampak seperti pemerintah atau pejabat tinggi, tetapi juga tersebar melalui berbagai praktik sosial dan institusional, termasuk pemberitaan media (Carlsen et al., 2020; Iftode, 2013). Artikel-artikel yang melaporkan dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK menunjukkan bagaimana media berfungsi sebagai alat untuk membingkai dan mendistribusikan informasi mengenai praktik-praktik kekuasaan dalam seleksi tersebut. Dalam hal ini, pemberitaan yang menyoroti manipulasi data atau pemalsuan dokumen mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi dalam proses seleksi, di mana individu atau kelompok yang memiliki akses kekuasaan, seperti pejabat pemerintah atau pihak yang terlibat dalam seleksi, dapat mengubah hasil seleksi untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka (Motion & Leitch, 2007; Schweber, 2017). Oleh karena itu, media berperan penting dalam mendekonstruksi atau memperkuat hubungan kekuasaan tersebut dengan memfokuskan perhatian pada pihak-pihak yang terlibat dan dampaknya terhadap transparansi dan keadilan seleksi (Guta et al., 2013).

### **Framing Meritokrasi dan Patronase**

Teori Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari figur otoritas, tetapi juga tersebar melalui praktik sosial, termasuk dalam pemberitaan media (Iftode, 2013). Dalam konteks ini, media membingkai dugaan kecurangan dengan menunjukkan ketegangan antara prinsip meritokrasi (seleksi berdasarkan kemampuan) dan sistem patronase (favouritisme dan korupsi). Wacana yang dibangun oleh media, baik yang menyoroti kegagalan sistem meritokrasi atau pengaruh patronase, mencerminkan ideologi sosial tentang keadilan, kesetaraan, dan transparansi (Johnson, 2020; Macintosh & Scapens, 1990). Misalnya, beberapa artikel mungkin lebih menekankan pada kegagalan sistem meritokrasi, sementara yang lain mengkritik pengaruh patronase dalam proses seleksi. Foucault juga berpendapat bahwa media berfungsi untuk membingkai isu-isu sosial dengan cara yang menciptakan ideologi tertentu. Dalam kasus seleksi PPPK, framing yang digunakan oleh media dapat memunculkan perbedaan antara sistem yang berlandaskan meritokrasi (berdasarkan kompetensi dan kemampuan) dengan praktik patronase (favoritisme berdasarkan hubungan pribadi atau politik). Beberapa artikel lebih banyak menyoroti ketidakadilan yang muncul akibat praktik patronase, sementara yang lain berusaha menunjukkan bahwa meskipun ada dugaan kecurangan, sistem seleksi tersebut sebenarnya berlandaskan pada prinsip meritokrasi. Dengan framing ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk pandangan masyarakat mengenai apa yang dianggap benar atau salah dalam proses seleksi tersebut (Melis & Chambers, 2021). Misalnya, pemberitaan yang lebih menekankan pada keberhasilan meritokrasi dapat memperkuat pandangan bahwa sistem seleksi adil, sedangkan pemberitaan tentang praktik patronase yang merajalela dapat memperburuk persepsi publik tentang ketidakadilan dalam proses seleksi PPPK.

### **Ideologi dan Persepsi Publik**

Menurut Foucault, media berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan pengetahuan dan membentuk persepsi publik. Paparan berulang terhadap kasus-kasus korupsi ini memengaruhi bagaimana publik memandang proses seleksi PPPK; apakah itu sistem yang intrinsik cacat atau lebih sebagai perjuangan antara integritas dan korupsi. Media memainkan peran penting dalam membangun narasi ini, yang pada gilirannya mempengaruhi legitimasi sistem ini di mata public (Dwivedi et al., 2021; Zhou et al., 2021). Pendekatan Foucault melihat bagaimana media memengaruhi ideologi yang terbentuk dalam masyarakat. Media, dengan memberitakan kasus-kasus kecurangan atau manipulasi dalam seleksi PPPK, mengarahkan publik untuk memandang sistem tersebut sebagai tidak adil dan korup. Framing yang dipilih oleh media akan menentukan apakah masyarakat lebih cenderung untuk melihat masalah ini sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem atau sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu tertentu dalam struktur pemerintahan (Nurrahmi, 2018; Sandi, 2023). Media dengan demikian menjadi pembentuk utama ideologi masyarakat, mengarahkan perhatian publik pada aspek-aspek tertentu dari suatu masalah sambil mengabaikan atau mengecilkan aspek lainnya (Carlsen et al., 2020; Rocha, 2011). Misalnya, pemberitaan yang lebih berfokus pada kegagalan sistem meritokrasi dapat menciptakan ideologi bahwa seleksi PPPK hanya menguntungkan mereka yang memiliki koneksi politik, sedangkan pemberitaan yang menyoroti ketidakadilan dapat memunculkan narasi bahwa sistem ini membutuhkan reformasi besar-besaran.

## **Perlawanan dan Kritik terhadap Struktur Kekuasaan**

Artikel McKinlay & Pezet, (2018) juga mencerminkan peran media dalam mengkritik struktur kekuasaan yang ada. Dengan melaporkan skandal-skandal tersebut, media tidak hanya memberikan informasi kepada publik tetapi juga mengundang perhatian terhadap sistem yang ada dan pihak-pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan ide Foucault bahwa kekuasaan tidak hanya diberlakukan dari atas ke bawah, tetapi juga diperdebatkan dari bawah, seperti terlihat dalam reaksi publik dan seruan untuk dilakukan penyelidikan (Alessandro et al., 2025; Iftode, 2013). Foucault juga menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada institusi formal, tetapi tersebar dalam praktik-praktik sosial yang lebih luas (Iftode, 2013). Media berperan sebagai arena di mana wacana mengenai kekuasaan ini diperdebatkan dan dikritik. Dalam hal ini, pemberitaan mengenai seleksi PPPK yang penuh kecurangan dan ketidakadilan dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Media tidak hanya berfungsi untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga untuk menciptakan ruang bagi perdebatan publik mengenai bagaimana seharusnya proses seleksi dilakukan dengan lebih adil dan transparan (Johnson, 2020). Misalnya, dengan menyoroti laporan-laporan yang menggambarkan kecurangan, media dapat menggerakkan publik untuk menuntut perubahan dalam sistem seleksi, sehingga wacana ini menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan yang ada.

### **1. Manipulasi Data dan Efektivitas Sistem Meritokrasi**

Suárez Serrato et al. (2019) mengungkapkan bahwa meskipun sistem meritokrasi dimaksudkan untuk memilih pejabat yang berkualitas, tantangan besar terkait manipulasi data yang tidak terverifikasi mengurangi efektivitas sistem tersebut. Dalam konteks seleksi PPPK, pemberitaan mengenai manipulasi data, seperti pemalsuan dokumen atau data yang tidak dapat diverifikasi, dapat dihubungkan dengan kritik terhadap ketidakefektifan sistem meritokrasi yang sering dijadikan dasar dalam proses seleksi. Melalui teori Foucault, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan yang ada dalam sistem seleksi ini; dari pejabat yang memiliki wewenang dalam proses seleksi hingga pengaruh hubungan patronase, dapat memperburuk kualitas dan keadilan dalam proses tersebut. Media yang melaporkan kecurangan ini menjadi sarana untuk membongkar relasi kekuasaan yang tidak terlihat dan memperlihatkan bagaimana data yang tidak valid dapat mengganggu prinsip-prinsip dasar meritokrasi.

### **2. Persepsi Politik dan Ketidakpercayaan**

Fiske, (2019) membahas dimensi “Kehangatan” dan “Kompetensi” dalam persepsi politik yang dibentuk oleh stereotip. Dalam kasus seleksi PPPK, media berperan penting dalam membentuk persepsi politik ini dengan menggambarkan bagaimana kompetensi atau kemampuan individu dipertanyakan. Media sering kali melaporkan ketidakadilan dalam seleksi, baik itu karena faktor patronase atau ketidakjelasan dalam proses seleksi, yang kemudian membentuk ketidakpercayaan publik terhadap integritas sistem tersebut. Melalui analisis wacana Foucault, kita dapat melihat bahwa media berfungsi untuk menciptakan ruang wacana yang memperkuat ketidakpercayaan ini, dengan menyoroti bagaimana elit yang berkuasa memanfaatkan kedudukan mereka untuk mempertahankan status quo dan mengabaikan prinsip-prinsip kompetensi.

### **3. Elitisme dan Mobilitas Sosial**

Atria et al. (2020) menunjukkan bahwa elit ekonomi sering kali mendukung meritokrasi, tetapi mereka lebih menekankan pada bakat pribadi daripada usaha keras. Dalam konteks seleksi

PPPK, media dapat membingkai pemberitaan dengan menyoroti bagaimana elit yang memiliki koneksi atau akses lebih besar, justru yang mendapatkan posisi terbaik, meskipun kompetensinya dipertanyakan. Ini sejalan dengan teori Foucault yang mengungkapkan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada elite politik atau ekonomi, tetapi tersebar dalam praktik sosial yang lebih luas, seperti dalam proses seleksi PPPK. Ketika elit yang memiliki pengaruh lebih besar dalam seleksi menggunakan sistem meritokrasi untuk memperkuat posisi mereka, media berperan untuk mengkritik sistem ini dengan menekankan adanya kesenjangan sosial yang terbentuk akibat dominasi elit.

#### 4. Keadilan Prosedural dan Ketimpangan dalam Akses

Penelitian mengenai interaksi kekuasaan dan pertimbangan meritokratis, yang menunjukkan adanya pola asimetris dalam akses terhadap daya tawar, sangat relevan dengan pemberitaan media tentang kecurangan dalam seleksi PPPK. Media sering kali membingkai kecurangan ini sebagai indikasi ketidakadilan dalam prosedur seleksi, di mana mereka yang memiliki posisi kuasa lebih besar; baik melalui patronase maupun hubungan politik, mendapatkan keuntungan lebih banyak. Teori Foucault mengenai "keadilan prosedural" sangat berguna untuk memahami bagaimana prosedur seleksi yang seharusnya berdasarkan pada prinsip meritokrasi, justru dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa. Oleh karena itu, media memainkan peran penting dalam mendekonstruksi narasi ini dan memperlihatkan ketidaksesuaian antara prinsip keadilan dan praktik yang terjadi di lapangan.

#### 5. Kritik terhadap Kebijakan dan Struktur Kekuasaan

Dohm, (1975) dan Kjelshus, (1968) mengungkapkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan bagaimana kebijakan sering kali dipengaruhi oleh elit yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam kasus seleksi PPPK, media berfungsi sebagai saluran kritik terhadap kebijakan ini dengan menyoroti bagaimana struktur kekuasaan dalam seleksi sering kali menghambat partisipasi yang lebih luas dan adil dari masyarakat. Dalam hal ini, pemberitaan yang mengkritik praktik-praktik tidak transparan dalam seleksi PPPK dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Media tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk menggugah kesadaran publik tentang perlunya reformasi dalam sistem seleksi agar lebih inklusif dan adil.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan mengenai seleksi PPPK di Indonesia, yang sering kali diwarnai dengan dugaan kecurangan, manipulasi data, dan praktik patronase, menggambarkan dinamika kekuasaan dan ideologi yang terbentuk melalui wacana media. Melalui analisis menggunakan teori Foucault, dapat disimpulkan bahwa media berperan sebagai agen yang membingkai proses seleksi PPPK dengan cara yang menciptakan dan memperkuat narasi kekuasaan, ketidakadilan, dan ketidaktransparanan. Media sering kali menyoroti ketidakadilan yang terjadi dalam sistem seleksi ini, baik itu dalam bentuk manipulasi data atau pemalsuan dokumen, yang mengungkapkan bagaimana relasi kekuasaan di antara para pejabat dan elit politik dapat mempengaruhi hasil seleksi. Pemberitaan tersebut mencerminkan ketegangan antara prinsip meritokrasi yang ideal dan praktik patronase yang sering kali terjadi dalam seleksi PPPK. Media

berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana praktik patronase dapat merusak sistem yang seharusnya berbasis pada kompetensi. Framing media yang sering kali lebih fokus pada ketidakadilan dan kecurangan dalam seleksi ini memperburuk persepsi publik terhadap efektivitas dan keadilan sistem seleksi tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa media, melalui pemberitaan yang mengkritik seleksi PPPK, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik mengenai ketidakadilan dalam sistem pemerintahan. Pemberitaan tersebut mendorong perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang ada dan membuka ruang bagi perdebatan mengenai perlunya reformasi dalam sistem seleksi agar lebih transparan dan adil.

### **Keterbatasan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan:

#### 1. Keterbatasan Akses ke Berita yang Relevan

Penelitian ini bergantung pada berita yang tersedia di media online. Oleh karena itu, kemungkinan ada bias dalam pemilihan sumber berita yang dapat mempengaruhi kesimpulan penelitian. Beberapa kasus kecurangan mungkin tidak dilaporkan oleh media mainstream atau hanya muncul di media lokal yang tidak terjangkau oleh penelitian ini.

#### 2. Keterbatasan Waktu

Penelitian ini hanya mencakup pemberitaan yang dapat diakses dalam waktu tertentu, sehingga tidak mencakup seluruh spektrum kasus atau perubahan dalam pemberitaan yang mungkin terjadi setelah periode penelitian. Hal ini dapat mempengaruhi hasil analisis yang bersifat dinamis.

#### 3. Interpretasi Wacana yang Subjektif

Analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini mungkin terpengaruh oleh subjektivitas peneliti, terutama dalam menginterpretasikan framing dan ideologi yang terbentuk dalam pemberitaan. Meski sudah diterapkan metode analisis yang sistematis, wacana yang digunakan media bisa memiliki berbagai interpretasi, yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

#### 4. Fokus pada Media Online

Penelitian ini lebih terfokus pada pemberitaan di media online dan tidak mempertimbangkan sumber media lainnya seperti televisi atau radio. Pemberitaan di media lain bisa memiliki cara framing yang berbeda, yang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang persepsi publik terhadap seleksi PPPK.

#### 5. Generalitas Temuan

Meskipun penelitian ini mengkaji pemberitaan tentang seleksi PPPK, temuan yang dihasilkan belum tentu bisa digeneralisasi ke seluruh proses seleksi PPPK di seluruh Indonesia, karena adanya perbedaan dalam implementasi di tiap daerah atau instansi pemerintahan.

#### 6. Keterbatasan Data Empiris

Penelitian ini lebih berfokus pada analisis kualitatif dari pemberitaan media dan tidak menyertakan data empiris atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi PPPK, yang dapat memberikan perspektif lebih mendalam tentang praktik-praktik yang terjadi dalam proses seleksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alessandro, C., Parra, C., & Pires, R. (2025). Energy Research & Social Science The politics of possibility in just transitions : A foucauldian reading. *Energy Research & Social Science*, 129(October), 104375. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104375>
- Armstrong, P. (2015a). Critical Perspectives on Accounting The discourse of Michel Foucault : A sociological encounter. *Critical Perspectives on Accounting*, 27, 29–42. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.10.009>
- Armstrong, P. (2015b). The discourse of Michel Foucault: A sociological encounter. *Critical Perspectives on Accounting*, 27, 29–42. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.10.009>
- Brady, D. (2021). The circulatory panopticon : Real names , rail infrastructure and Foucault ’ s realist turn. *Political Geography*, 90(July), 102463. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102463>
- Carlsen, A., Clegg, S. R., Pitsis, T. S., & Mortensen, T. F. (2020). From ideas of power to the powering of ideas in organizations : Re fl ections from Follett and Foucault. *European Management Journal*, 38(6), 829–835. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.03.006>
- Dewey, S. H. (2016). ( Non- ) use of Foucault ’ s *Archaeology of Knowledge and Order of Things* in LIS journal literature , 1990-2015. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2015-0096>
- Dohm, R. R. (1975). *The Decision-Making Process & mdash ; Not to Be Dominated by Sophisticated Management Techniques*. 53–54.
- Drury, W. (1975). *Continuing Questions of Public Policy-Making*. 50–51.
- Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Hughes, D. L., Carlson, J., Filieri, R., Jacobson, J., Jain, V., Karjaluoto, H., Kefi, H., Krishen, A. S., Kumar, V., Rahman, M. M., Raman, R., Rauschnabel, P. A., Rowley, J., Salo, J., Tran, G. A., & Wang, Y. (2021). Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions. *International Journal of Information Management*, 59(July 2020), 102168. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168>
- Fiske, S. T. (2019). Political cognition helps explain social class divides : Two dimensions of candidate impressions , group stereotypes , and meritocracy beliefs. *Cognition*, 188(May 2018), 108–115. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.11.007>
- Gale, J., & Yogeewaran, K. (2025). Journal of Experimental Social Psychology A colorblind ideal and the motivation to improve intergroup relations : The role of an ( in ) congruent status quo ☆. *Journal of Experimental Social Psychology*, 116(May 2023), 104693. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2024.104693>
- Gliddon, R. T. (1975). *Considering Both Elitism and Participation*. 51–53.
- Guizzo, D., Vigo, I., & Lima, D. (2015). Foucault ’ s contributions for understanding power relations in British classical political economy. *Economia*, 16(2), 194–205. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2015.06.002>
- Guta, A., Nixon, S. A., & Wilson, M. G. (2013). Social Science & Medicine Resisting the seduction of “ ethics creep ” : Using Foucault to surface complexity and contradiction in research ethics review. *Social Science & Medicine*, 98, 301–310. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.09.019>
- Iftode, C. (2013). hilosophy a Critical assessment and conflicting metaphilosophical views. *Procedia* <https://jurnal.utu.ac.id/jbkan/>

- *Social and Behavioral Sciences*, 71, 76–85. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.011>
- Jessop, B. (2007). *From micro-powers to governmentality : Foucault ' s work on statehood , state formation , statecraft and state power*. 26(May 1968), 34–40. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2006.08.002>
- Johnson, A. G. (2020). We are not yet done exploring the hospitality workforce. *International Journal of Hospitality Management*, 86(October), 102402. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102402>
- Kjelshus, B. (1968). The Future of Public Policy-Making-Will the Process be Elitist of Participatory. *Public Administration Forum*, 43–47.
- Kuppens, T., Spears, R., Manstead, A. S. R., Spruyt, B., & Easterbrook, M. J. (2018). Journal of Experimental Social Psychology Educationism and the irony of meritocracy: Negative attitudes of higher educated people towards the less educated. *Journal of Experimental Social Psychology*, 76(November 2017), 429–447. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.11.001>
- Ladkin, D., & Probert, J. (2021). From sovereign to subject : Applying Foucault ' s conceptualization of power to leading and studying power within leadership. *The Leadership Quarterly*, 32(4), 101310. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.101310>
- Macintosh, N. B., & Scapens, R. W. (1990). Structuration theory in management accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 15(5), 455–477. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(90\)90028-S](https://doi.org/10.1016/0361-3682(90)90028-S)
- Mckinlay, A., & Pezet, E. (2018). Critical Perspectives on Accounting Foucault , governmentality , strategy : From the ear of the sovereign to the multitude. *Critical Perspectives on Accounting*, 53, 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.03.005>
- McKinlay, A., & Pezet, E. (2018). Foucault, governmentality, strategy: From the ear of the sovereign to the multitude. *Critical Perspectives on Accounting*, 53, 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.03.005>
- Melis, C., & Chambers, D. (2021). The construction of intangible cultural heritage: A Foucauldian critique. *Annals of Tourism Research*, 89, 103206. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103206>
- Motion, J., & Leitch, S. (2007). *A toolbox for public relations : The oeuvre of Michel Foucault*. 33, 263–268. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2007.05.004>
- Nurrahmi, F. (2018). The Narrative of Identity in the Coverage of Aceh's Flag. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 2(2), 213–231. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i2.780>
- Rocha, L. A. (2011). Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences Scientia sexualis versus ars erotica : Foucault , van Gulik , Needham. *Studies in History and Philosophy of Biol & Biomed Sci*, 42(3), 328–343. <https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2011.01.003>
- Sandi, Y. F. (2023). The Disruption of Marketing Communication Concepts in the Marketing 3.0 Era: A Narrative Literature Review. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 6(3), 961–968. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v6i3.159>
- Schweber, L. (2017). Energy Research & Social Science Jack-in-the-black-box : Using Foucault to explore the embeddedness and reach of building level assessment methods. *Energy Research & Social Science*, 34(November 2016), 294–304. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.08.005>

- Sudradjat, I. (2012). *Foucault , the Other Spaces , and Human Behaviour*. 36(June 2011), 28–34. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.004>
- Swazo, N. K. (2005). *Research integrity and rights of indigenous peoples : appropriating Foucault Ō s critique of knowledge / power*. 36, 568–584. <https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2005.07.006>
- Zhou, S., Blazquez, M., McCormick, H., & Barnes, L. (2021). How social media influencers’ narrative strategies benefit cultivating influencer marketing: Tackling issues of cultural barriers, commercialised content, and sponsorship disclosure. *Journal of Business Research*, 134(November 2019), 122–142. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.011>